

# MODUL PENGOPERASIAN PROTOTYPE APLIKASI SIMONSILA



BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN  
PROVINSI  
MALUKU UTARA

DISUSUN OLEH  
TIM APLIKASI SIMONSILA  
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara  
Bidang APD

## MODUL PENGOPERASIAN

### USER REQUIREMENT

Aplikasi SiMonSiLa dikembangkan dengan menggunakan konsep berbasis web (*web base application*) artinya pengguna dapat mengakses Aplikasi SiMonSiLa dimanapun dan kapanpun secara *real time* dengan menggunakan *browser* seperti *edge, internet explorer, opera, mozilla firefox, google chrome* dan lain sebagainya.

Kebutuhan pengguna untuk dapat mengakses Aplikasi SiMonSiLa antara lain:

- a. Jaringan internet yang stabil,
- b. Perangkat/*Device* (Laptop, *SmartPhone*, dan sejenisnya) yang dapat menerima dan mengakses internet,
- c. *Web Browser* untuk mengakses alamat web Aplikasi SiMonSiLa (seperti *edge, internet explorer, opera, mozilla firefox, google chrome*, dan lain sebagainya).

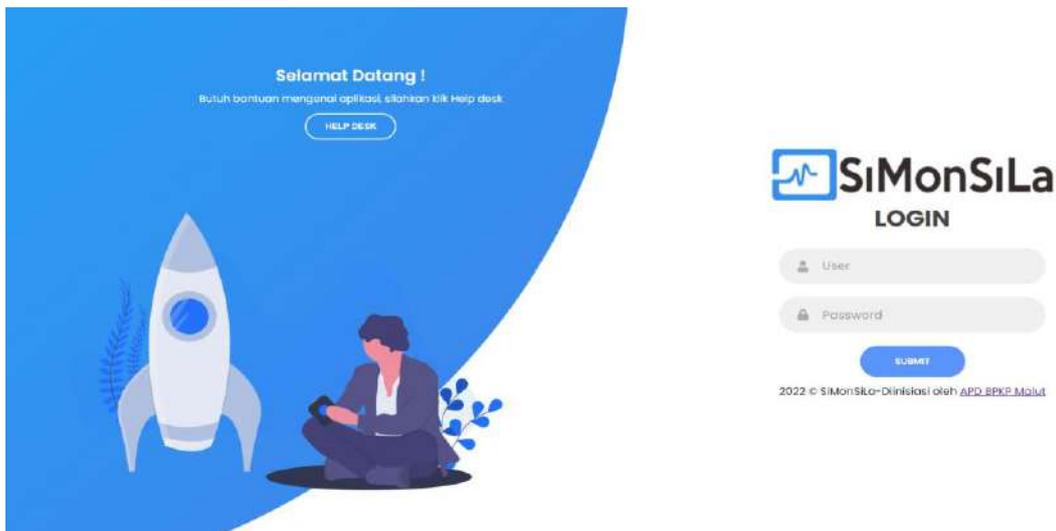
## USER GUIDE

### MONITORING DAN EVALUASI MANAJEMEN RISIKO

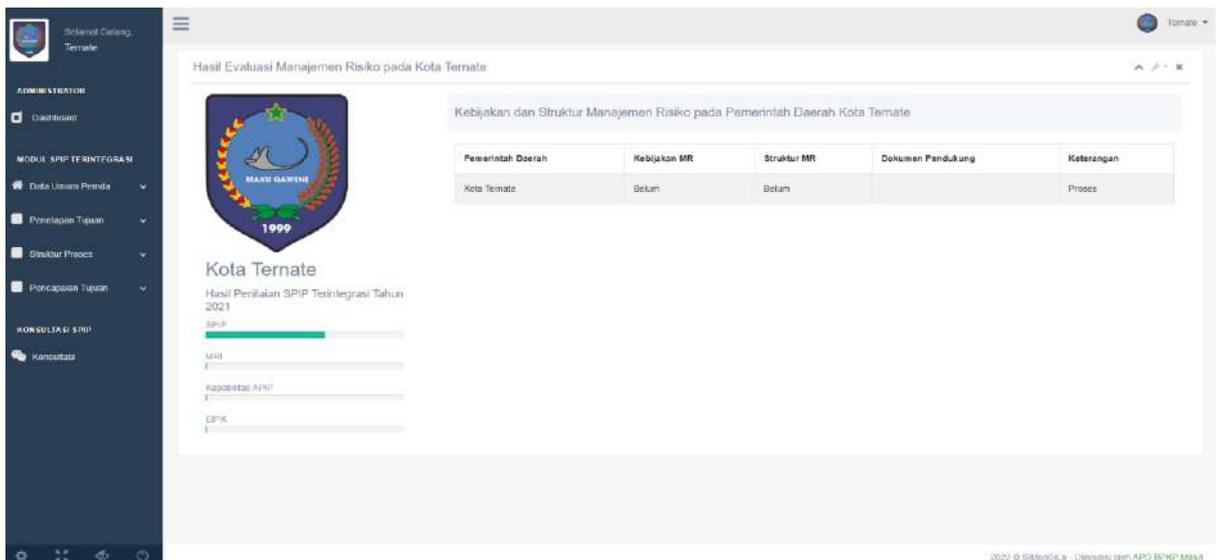
#### TINGKAT PEMERINTAH DAERAH

Pedoman untuk dapat mengakses Aplikasi SiMonSiLa adalah sebagai berikut :

1. Buka *Web Browser* untuk mengakses SiMonSiLa di alamat web: [www.simonsila.com](http://www.simonsila.com)
2. Setelah muncul halaman Login Aplikasi SiMonSiLa, maka dapat langsung melakukan login. (apabila belum memiliki *User* dan *Password* silahkan menghubungi admin)

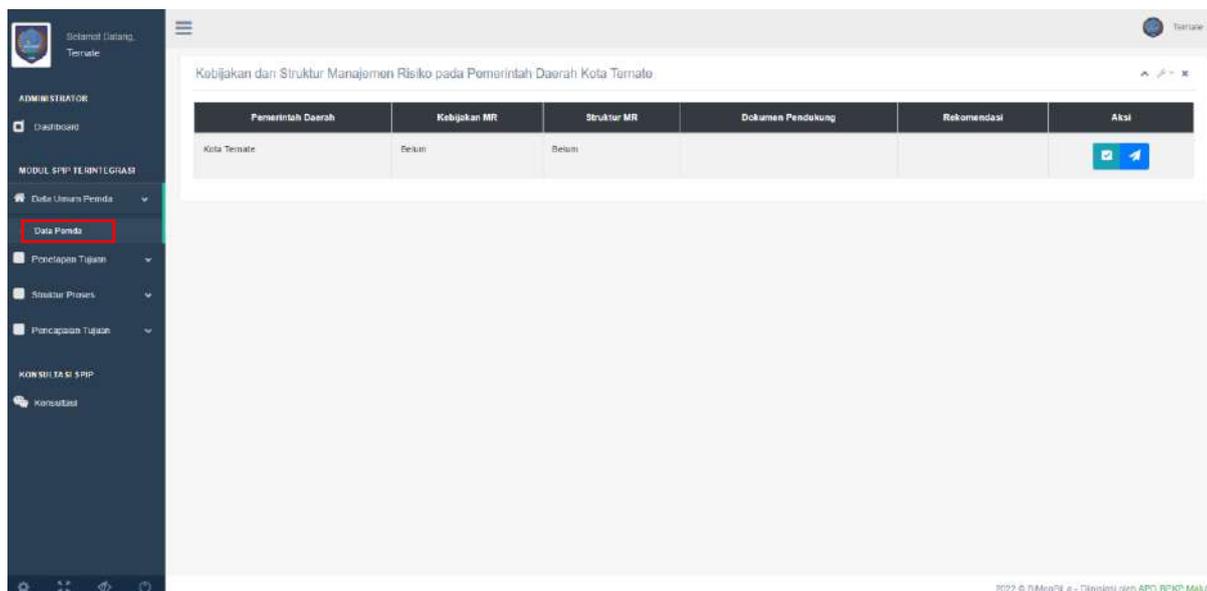


3. Setelah login berhasil, maka aplikasi akan mengarahkan anda secara otomatis ke halaman *dashboard*.

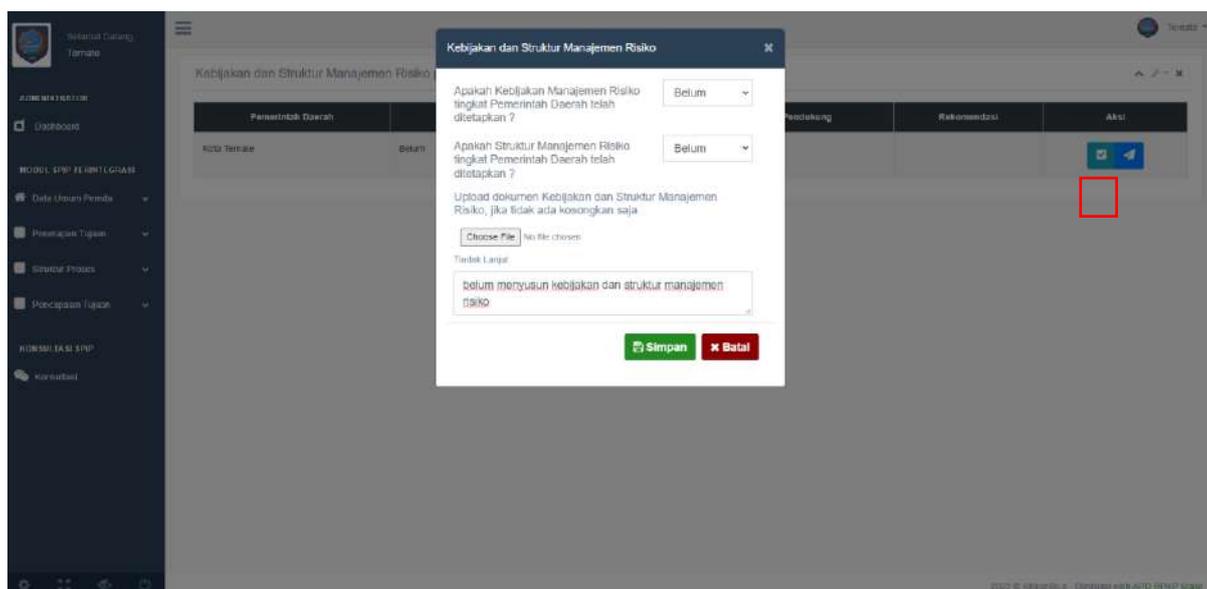


Halaman *dashboard* menampilkan info terkait capaian SPIP Terintegrasi tahun lalu dan Monitoring serta Evaluasi terhadap Kebijakan serta Struktur Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah.

4. Untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Kebijakan dan Struktur Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah dapat diakses pada menu **Data Umum Pemda**



5. Lakukan pengisian monitoring dan evaluasi dengan klik tombol edit pada tabel yang tersedia

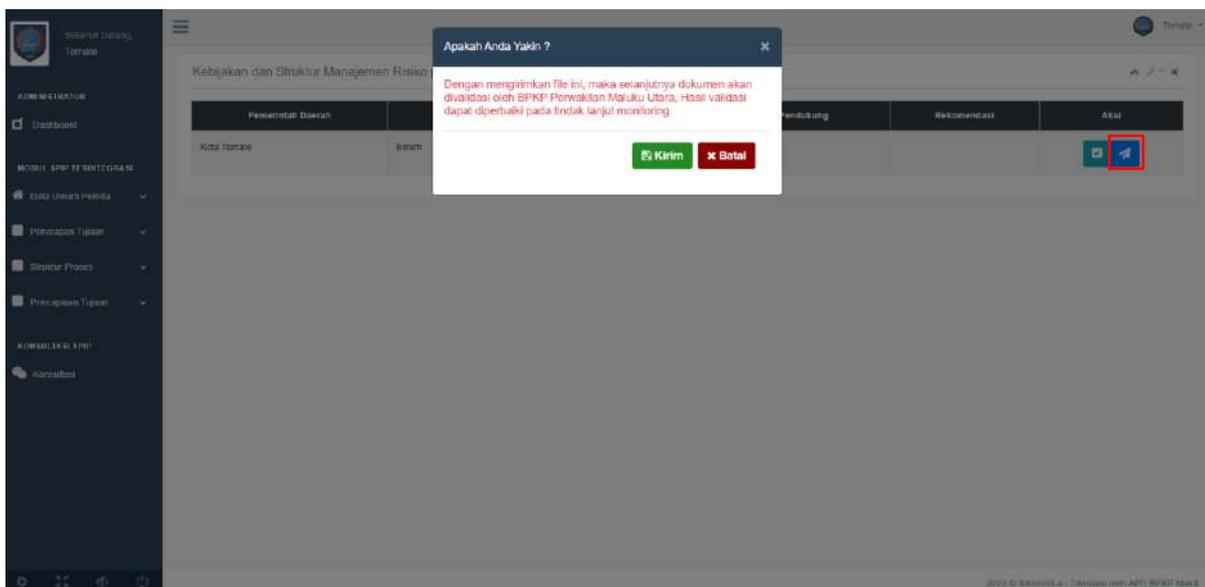


Pengisian dilakukan dengan cara menjawab apakah kriteria dari penerapan Kebijakan dan Struktur Manajemen Risiko telah dilakukan pada Pemerintah Daerah.

Jika memang sudah dilakukan, maka *upload* file Kebijakan dan Struktur Manajemen Risiko Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.

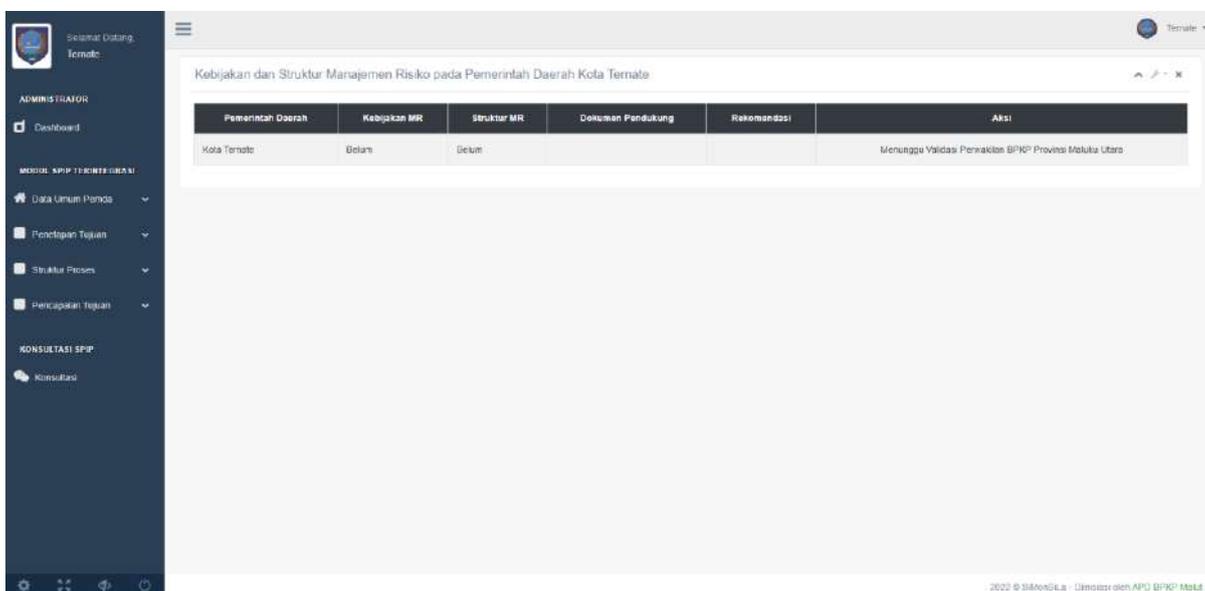
*\*File yang diupload harus berformat: PDF, DOC, DOCX dan ukuran Maks. 5 Mb jika tidak maka file tidak akan dapat terupload dengan sempurna*

6. Setelah selesai melakukan pengisian, Pemerintah Daerah dapat mengirim hasil pengisian kepada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara untuk dilakukan validasi



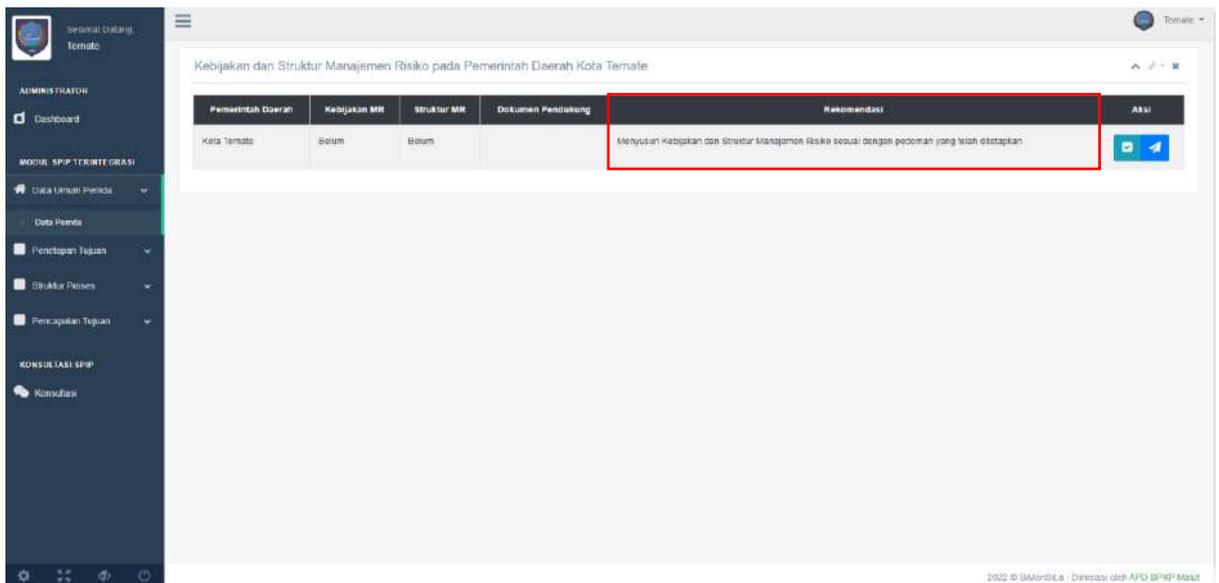
*\*Peringatan data yang dikirim tidak bisa diedit lagi oleh Pemerintah Daerah, perbaikan hanya dapat dilakukan saat tindak lanjut monitoring.*

7. Setelah dikirim, maka status akan berubah menjadi “Menunggu Validasi Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara”



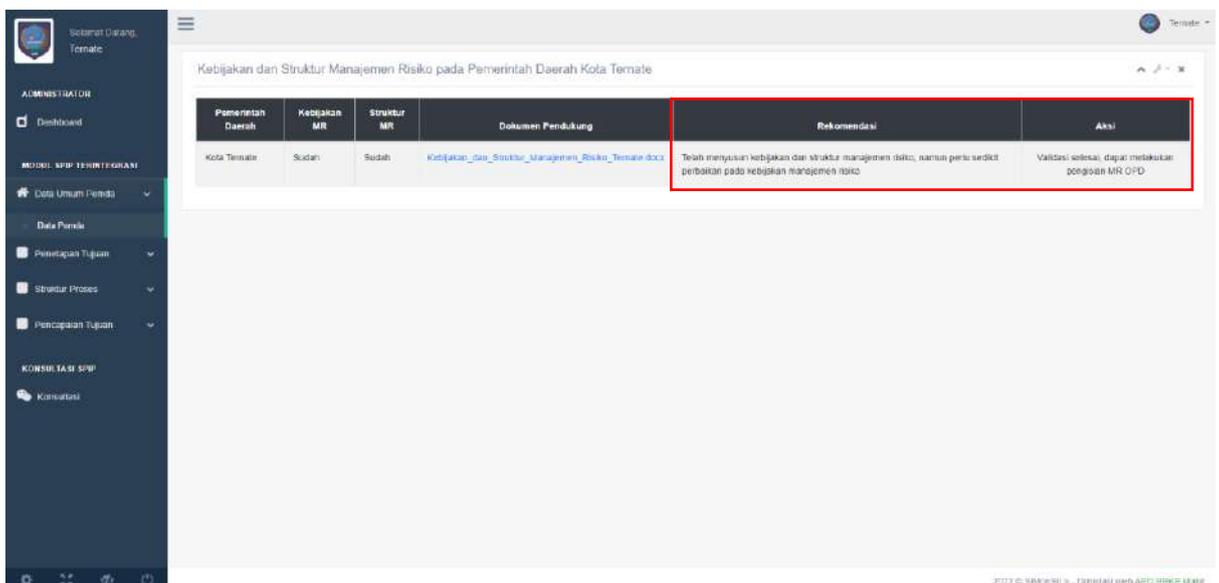
Setelah Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara selesai melakukan validasi, maka akan diberikan rekomendasi untuk perbaikan jika hasilnya kurang memadai dan akan dirubah statusnya menjadi final apabila sudah cukup memadai.

8. Hasil validasi : Pemberian Rekomendasi atas hasil validasi yang kurang memadai



Kolom Rekomendasi yang semula kosong akan terisi dengan rekomendasi yang diberikan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya Pemerintah Daerah melakukan perbaikan terhadap hasil validasi dengan melakukan edit dan mengirimkan hasil perbaikannya (mengulang kembali langkah Nomor 5 dan 6). Rekomendasi dan perbaikan terhadap Kebijakan dan Struktur Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah akan terus dilakukan sampai hasilnya menjadi cukup memadai.

9. Hasil validasi : Pemberian Rekomendasi atas hasil validasi yang cukup memadai



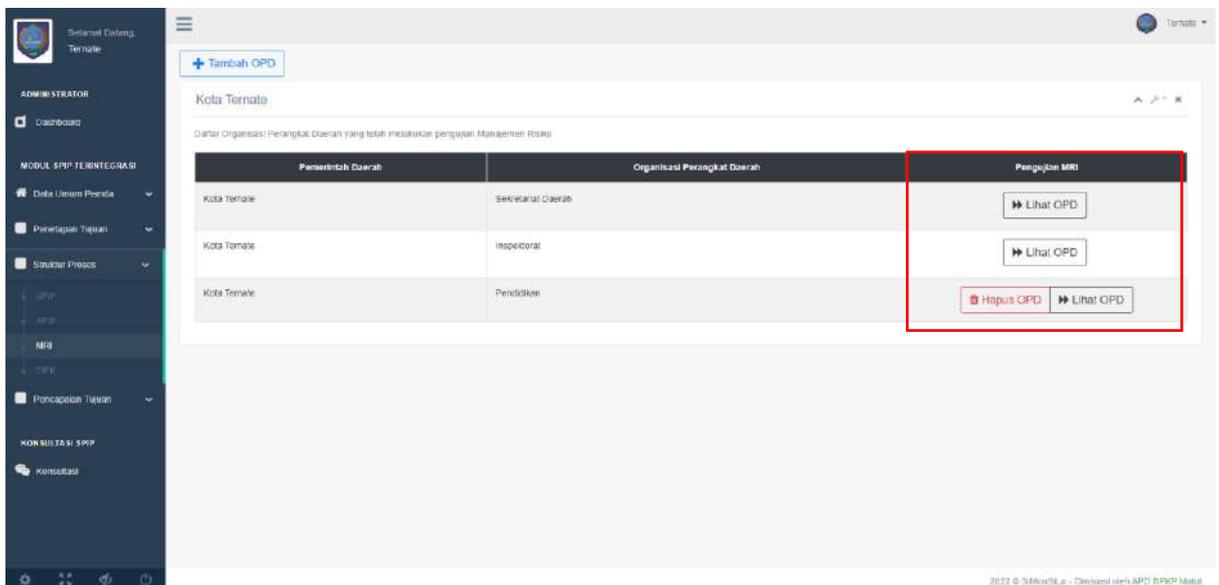
Apabila Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menganggap bahwa Kebijakan dan Struktur Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah sudah cukup memadai, maka selanjutnya Pemerintah Daerah dapat monitoring manajemen risiko pada tingkat OPD.

USER GUIDE  
MONITORING DAN EVALUASI MANAJEMEN RISIKO  
TINGKAT OPD

Monitoring dan Evaluasi Manajemen Risiko tingkat OPD, **hanya dapat dilakukan jika Kebijakan dan Struktur Manajemen Risiko Tingkat Pemerintah Daerah telah selesai divalidasi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara dengan hasil cukup memadai.**

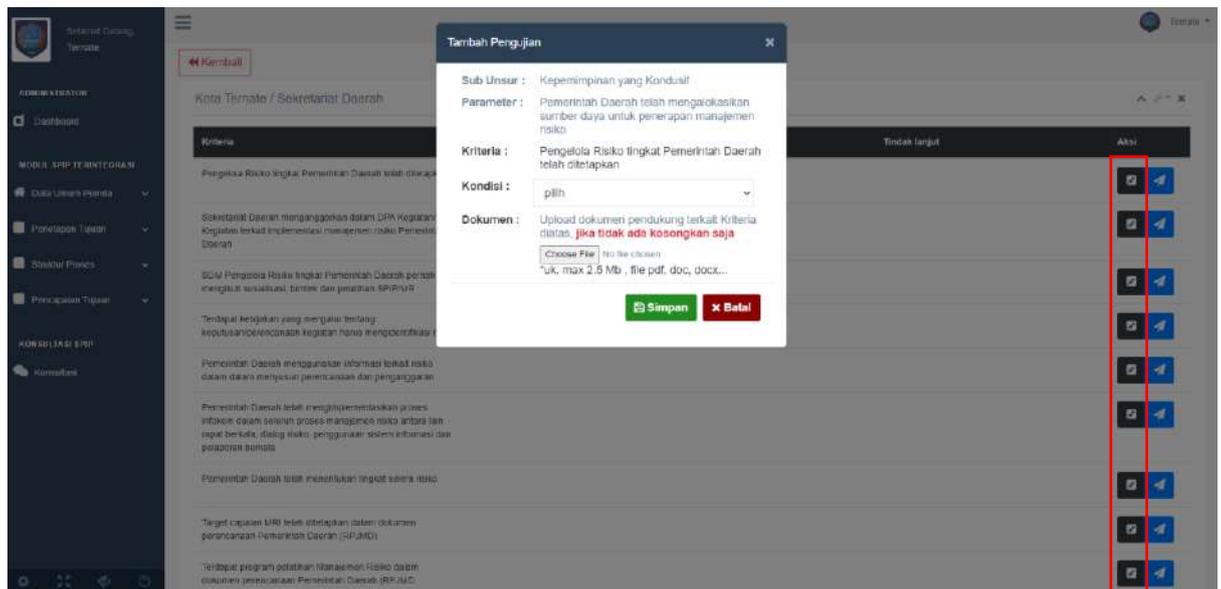
Pedoman untuk dapat mengakses Aplikasi SiMonSiLa adalah sebagai berikut :

1. Untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Manajemen Risiko pada tingkat OPD dapat diakses pada menu **Struktur Proses** sub menu **MRI**.



- a. Menu tambah OPD adalah untuk menambahkan OPD yang akan dilakukan Monitoring dan evaluasi terkait Manajemen Risiko (OPD yang wajib dilakukan monitoring dan evaluasi adalah Sekretaris Daerah dan Inspektorat).
- b. Menu Hapus OPD digunakan untuk menghapus **Seluruh monitoring dan evaluasi terhadap pengujian Manajemen risiko yang dilakukan pada OPD tersebut.**
- c. Menu Lihat OPD digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengujian Manajemen risiko pada OPD tersebut. Monitoring dan evaluasi dilakukan per sub pengujian Manajemen risiko.

- Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dengan cara input pengisian pada seluruh kriteria pengujian manajemen risiko yang tersedia

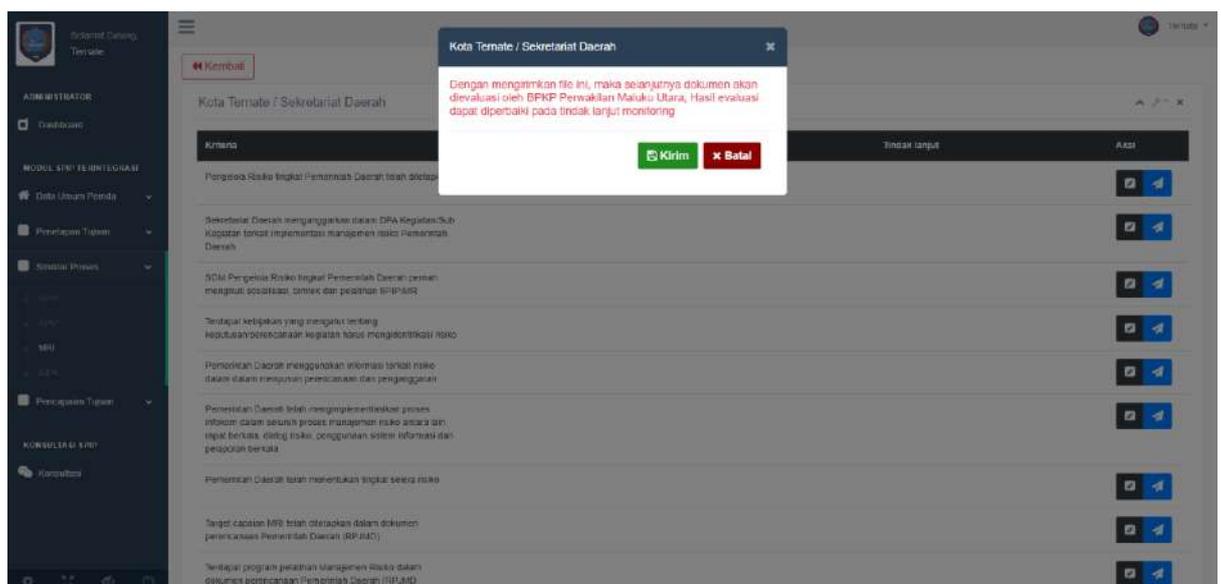


Pengisian dilakukan dengan cara menjawab apakah kondisi saat ini telah sesuai dengan kriteria yang diminta dari pengujian.

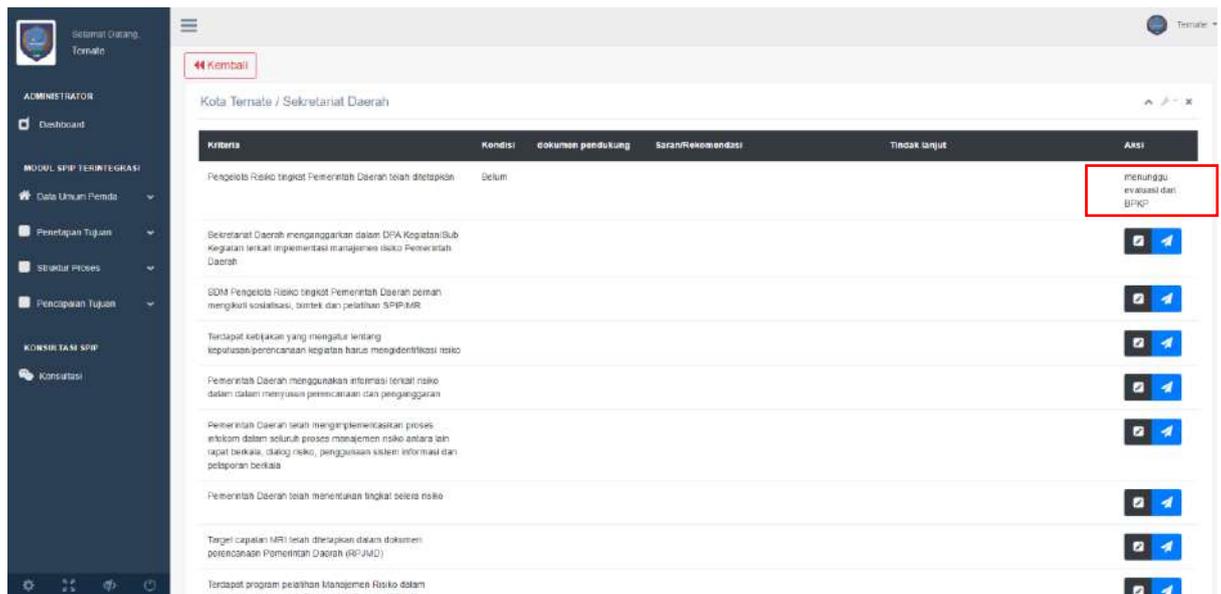
Jika memang sudah sesuai, maka *upload* file dokumen bukti yang mendukung bahwa kriteria pengujian pernah diterapkan atau ditetapkan.

*\*File yang diupload harus berformat: PDF, DOC, DOCX dan ukuran Maks. 2,5 Mb jika tidak maka file tidak akan dapat terupload dengan sempurna*

- Setelah selesai melakukan pengisian, OPD dapat mengirim hasil pengisian kepada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara untuk dilakukan evaluasi

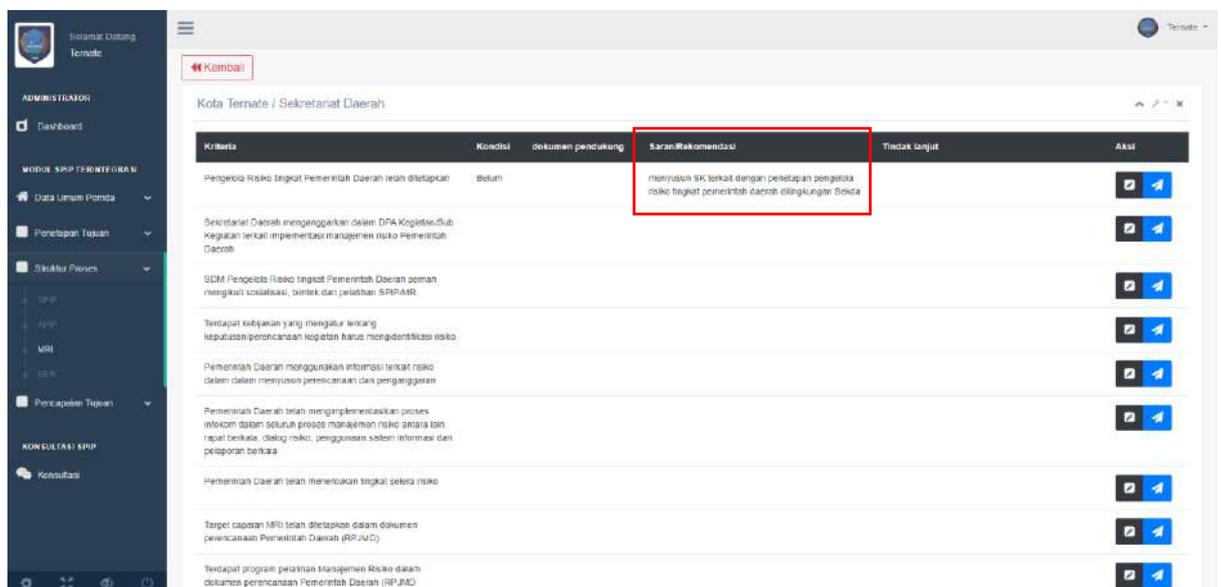


4. Setelah dikirim, maka status akan berubah menjadi “Menunggu Evaluasi dari BPKP”



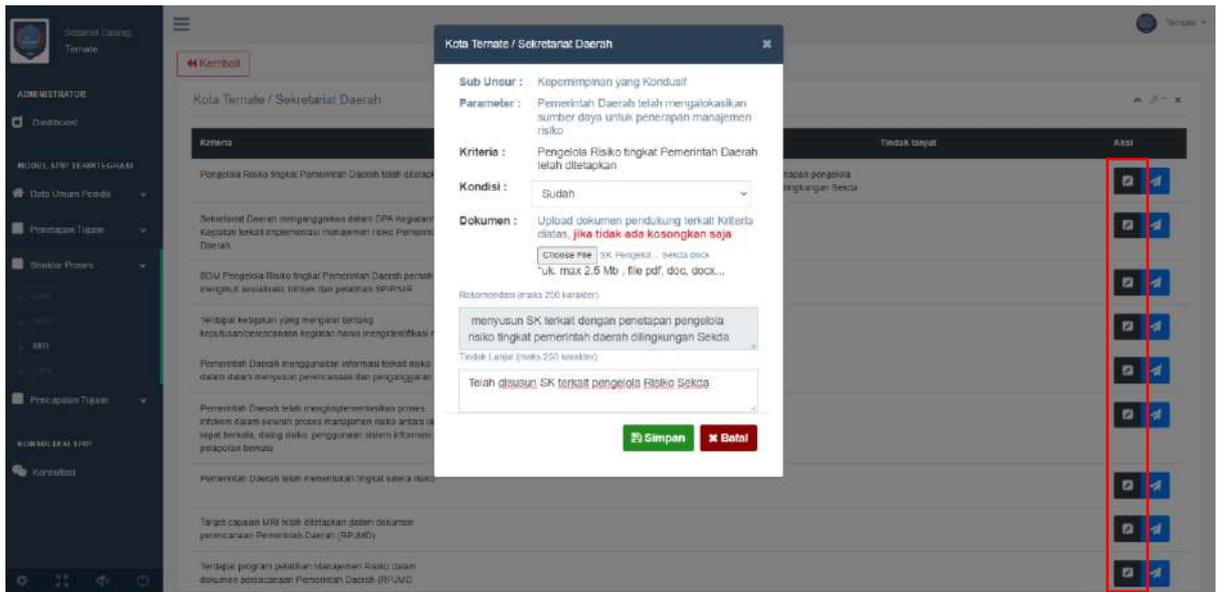
Setelah Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara selesai melakukan evaluasi, maka akan diberikan rekomendasi untuk perbaikan jika hasilnya kurang memadai dan akan dirubah statusnya menjadi final apabila sudah cukup memadai.

5. Hasil validasi : Pemberian Rekomendasi atas hasil evaluasi yang kurang memadai



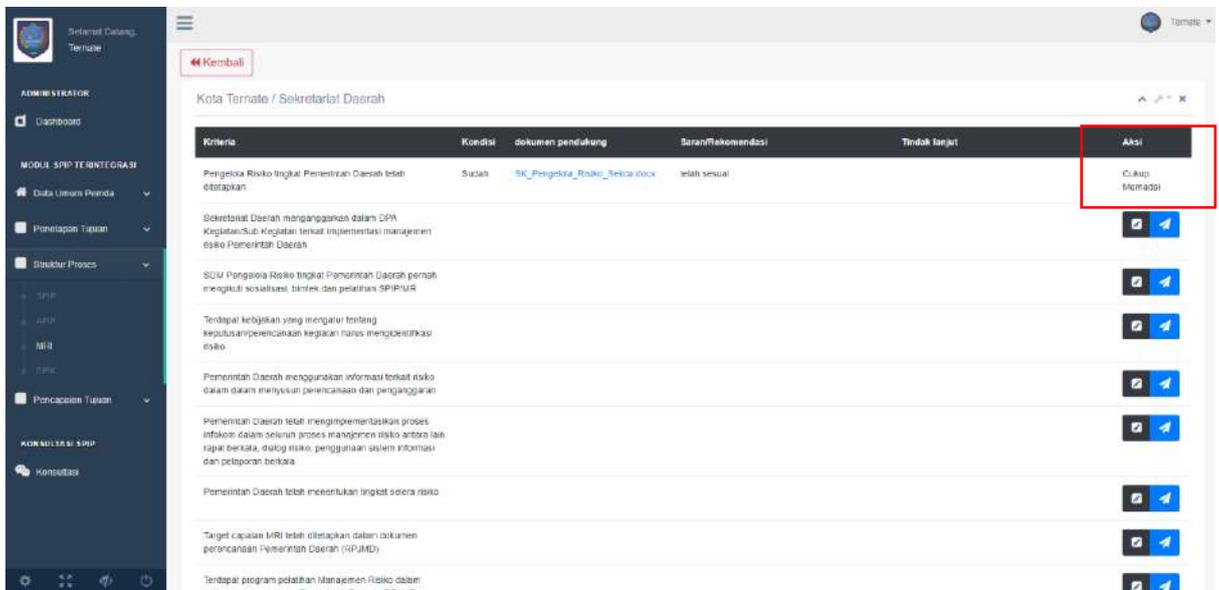
Kolom Rekomendasi yang semula kosong akan terisi dengan rekomendasi yang diberikan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya OPD melakukan perbaikan terhadap hasil validasi dengan melakukan edit dan mengirimkan hasil perbaikannya (mengulang kembali langkah Nomor 2 dan 3). Rekomendasi dan perbaikan terhadap pengujian Manajemen Risiko pada OPD akan terus dilakukan sampai hasilnya menjadi cukup memadai.

6. Perbaiki Pemberian Rekomendasi atas hasil evaluasi yang kurang memadai



Apabila sudah melakukan tidak lanjut maka dapat melakukan pengisian dan mengirim Kembali untuk dievaluasi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

7. Hasil validasi : Pemberian Rekomendasi atas hasil validasi yang cukup memadai



Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menganggap bahwa sub unsur pengujian Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah sudah cukup memadai.